KEDIRI BERBUDAYA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2025



Hubungi
Telp. (0354) 696714

Informasi
Email : diskominfo@kedirikab.go.id
Website: diskominfo.kedirikab.go.id

Alamat
Jl. Sekartaji No.2 Doko
Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman bagi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik guna mendukung terwujudnya Visi pembangunan Kabupaten Kediri serta wujud komitmen kami dalam menjalankan amanah pembangunan daerah, selaras dengan dinamika perubahan dan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada kerangka regulasi yang kuat, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Landasan hukum ini memastikan bahwa perencanaan kami telah terintegrasi secara komprehensif dan akuntabel sesuai standar pemerintah pusat. Selain itu, kami juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, yang menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Tak kalah penting, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi landasan bagi kami untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

Tahun 2025 merupakan periode krusial bagi Diskominfo Kabupaten Kediri untuk beradaptasi dan berinovasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan digital yang masif menuntut kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat infrastruktur digital, serta memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan memperhatikan berbagai aspek strategis, mulai dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisis kebutuhan dan tantangan di masa mendatang, hingga penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah. Kami berkomitmen untuk fokus pada peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan smart city yang inklusif, penguatan keamanan siber, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini tidak lepas dari dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami senantiasa terbuka terhadap masukan dan kolaborasi demi tercapainya tujuan bersama.

Akhir kata, kami berharap Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi Diskominfo Kabupaten Kediri dalam berkontribusi aktif mewujudkan Kabupaten Kediri yang maju, inovatif, dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Kediri, 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Landasan Hukum **2**

1.3 Maksud dan Tujuan **6**

1.4 Sistematika Penulisan **6**

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 ..... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri **8**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah **42**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **45**

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD **51**

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat **70**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH **73**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional **73**

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah **75**

3.3 Program dan Kegiatan **77**

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI **93**

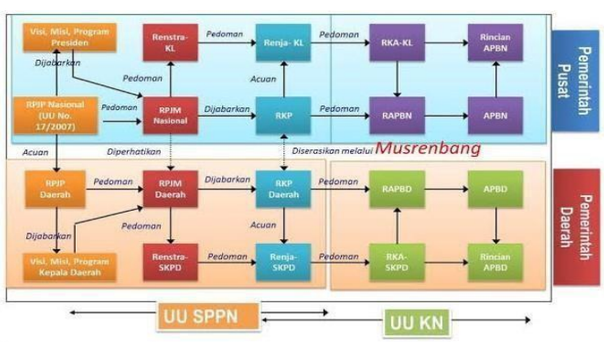
BAB V PENUTUP **104**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu substansi Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri. Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kediri sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026. Keterkaitan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1.1

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri 2025 disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
c. Program prioritas yang tertuang dalam Misi II Kabupaten Kediri yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
2. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Reviu terhadap rancangan awal dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, serta perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Bab IV Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, Bab ini berisi simpulan, harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana, serta bagaimana capaian tersebut berkontribusi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berpedoman pada aturan kunci dalam menyusun perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk tahun 2025 dan seterusnya. Pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Peraturan ini merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Aturan ini sangat penting karena menetapkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur (penamaan) yang seragam untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan keseragaman dan kemudahan dalam pengelompokan, pemberian kode, dan penamaan setiap kegiatan serta sub kegiatan. Ini krusial untuk memudahkan analisis, pelaporan, dan pengelolaan anggaran, serta mencakup indikator capaian untuk tahun 2025. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan ada keselarasan dan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan tahapan krusial dalam mencapai Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan adapun target-target yang telah ditetapkan dalam setiap program dan kegiatan pada Renja Perubahan 2025 berhasil dicapai. Ini termasuk analisis terhadap indikator kinerja, output, dan outcome yang telah ditetapkan. Susunan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri ini cukup komprehensif, mengelola 3 Urusan, 5 Program, 11 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Rincian ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada aspek teknis komunikasi dan informatika, tetapi juga pada pondasi administratif dan penunjang yang esensial bagi kelancaran operasionalnya.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

1.4.2 Penerangan Bangunan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Relasi Media

2.1.2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

2.1.3 Pelayanan Informasi Publik

2.1.4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

2.1.5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2.1.6 Penyusunan Konten

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

3.1 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

3.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

4.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

4.1.2 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

5.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A	K	A	K	A	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatkanya Kepuasan Pengguna Layanan "Respon Instan" Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri**	**Sistem atau Aplikasi Pendukung Layanan "Respon Instan" yang Optimal**	**100%**	**Rp. 8.608.145.163**	**40%**	**3.474.913.155**			**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kab Kediri Tahun 2025-2029**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Meningkatnya sistem manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang kuat, transparan, dan berorientasi pada hasil, demi tercapainya tujuan***	***Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah yang terintegrasi, selaras, dan terukur, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang Valid, Komprehensif, dan Transparan***	***100%***	***Rp. 1.920.000***	**33%**	**640.000**			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A	K	A	K	A	
	pembangunan daerah yang efektif dan efisien.								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Optimalisasi Penggunaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran yang Mendekati Target Penyerapan	12 Lap	Rp. 1.280.000	50%	640.000			
		Laporan Efisiensi Belanja Operasional	12 Lap						
		Laporan Efektivitas Belanja Modal	12 Lap						
		Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang Terukur dan Realistis	12 Dok						
		Laporan Bukti Penghematan atau Peningkatan Nilai dari Anggaran yang Digunakan	12 Lap						
		Laporan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan dan Kompetitif	12 Lap						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Lap	Rp. 640.000	0%	-			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)							
			K	A	K	A	K	A	
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah	(LAKIP) yang Valid dan Tepat Waktu							
		Dokumen Perencanaan Kinerja yang Jelas dan Terukur (RENJA, RENJA PERUBAHAN, RENSTRA, LKJIP, Rencana Aksi monitoring, Perjanjian Kinerja	14 Dok						
		Data dan Informasi Kinerja yang Transparan dan Dapat Diakses Publik	14 Data						
		Laporan Sistem Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang Berjalan Efektif	5 Lap						
		Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja	5 Lap						
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan yang	15 Dok						

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)							
			K	A	K	A	K	A	
		Tersedia dan Diterapkan							
		Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Berfungsi dan Ditindaklanjuti	3 Aplikasi						
		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Meningkat	5 Lap						
		Inovasi Layanan Publik yang Diluncurkan dan Dimanfaatkan	1 Lap						
		Bukti Penyederhanaan Prosedur Layanan (SOP Baru/Revisi)	1 SOP						
		Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan	1 Dok						
		Laporan monitoring Fasilitas Pelayanan yang Ramah Pengguna (misalnya, ruang tunggu nyaman, informasi jelas, akses disabilitas)	5 Lap						

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A	K	A	K	A	
		Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Direvisi/Diterbitkan dan Diimplementasikan	1 Lap						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Terjaminnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD***	***Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan/triwulanan/tahunan***	***100%***	***Rp.*** 6.883.947.061	39%	266.270.800			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terjaganya Kontinuitas Operasional Gaji dan Tunjangan ASN Organisasi	Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Tercatat Akurat	12 Data	Rp. 5.786.005.061	38%	2.177.229.172			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terciptanya Lingkungan Kerja yang Terorganisir dan Profesional	Laporan Pertanggungjawaban Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terkelola dengan baik	12 Lap	Rp. 924.350.000	44%	407.461.628			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan	Data Transaksi Keuangan yang Terekam dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)	12 Data	Rp. 171.522.000	48%	81.580.000			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A		K	A	K	A	
	Perundang-undangan									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD yang Komprehensif	Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun yang Lengkap dan Akurat	12 Lap	Rp.	690.000	0%	-			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terciptanya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keuangan Secara Berkelanjutan	Laporan Keuangan Periodik SKPD (Bulanan/Triwulanan/ Semesteran) yang Lengkap dan Akurat	12 Lap	Rp.	690.000	0%	-			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akurasi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Periodik	2 Lap	Rp.	690.000	0%	-			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Terjaminnya Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah***	***Data Barang Milik Daerah yang Terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMDA BMD atau sistem sejenis)***	***12 Lap***	***Rp.***	**115.575.500**	**39%**	**45.000.000**			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)								
			K		A	K	A	K	A	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpeliharanya Nilai Aset Barang Milik Daerah SKPD	Daftar Barang Milik Daerah (BMD) yang Terinventarisasi dan Tervalidasi Secara Berkala	12 Lap	Rp.	115.471.700	39%	45.000.000			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Tahunan/Periodik)	12 Lap	Rp.	103.800	0%	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terjaminnya Akuntabilitas dan Ketertelusuran Informasi/Dokumen***	***Dokumen Tata Naskah Dinas dan Kearsipan***	***100%***	***Rp.***	**595.679.700**	**78%**	**464.286.548**			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pencahayaan yang Memadai dan Kelancaran Operasional Peralatan Elektronik dan TIK di Seluruh Area Kantor	Laporan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang Terpasang dan Berfungsi	12 Lap	Rp.	4.708.300	0%	-			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran	Laporan Daftar Inventaris Peralatan dan Perlengkapan	12 Lap	Rp.	33.375.100	22%	7.362.900			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A		K	A	K	A	
	Melalui Pengadaan yang Tepat Sasaran	Kantor yang Terbarukan								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Efisiensi Pengelolaan Fasilitas Kantor	Laporan Daftar Inventaris Peralatan Rumah Tangga	12 Lap	Rp.	305.630.000	95%	289.910.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelancaran Operasional Harian Kantor yang Berkelanjutan	Laporan Daftar Penerimaan dan Distribusi Bahan Logistik	12 Lap	Rp.	14.711.000	33%	4.880.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Efektivitas penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Dok	Rp.	21.515.500	42%	9.000.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman ASN terhadap Regulasi dan Kebijakan Terkini	Laporan Daftar Inventaris Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Lap	Rp.	25.560.000	14%	3.589.800			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pemahaman ASN terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas SKPD	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Lap	Rp.	190.179.800	79%	149.543.848			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terpeliharanya Aset dan Fasilitas Kantor dari Kerusakan/Kehilangan***	***Laporan Kegiatan Petugas Kebersihan/Keamanan***	***12 Lap***	***Rp.***	**852.172.902**	**34%**	**288.138.307**			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)								
			K	A		K	A	K	A	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran Operasional Perkantoran Secara Berkesinambungan	Dokumen Kontrak/Perjanjian Layanan Utilitas	12 Dok	Rp.	429.121.002	38%	163.018.307			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Efisiensi dalam Pengelolaan Fasilitas Kantor	Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	Rp.	423.051.900	30%	125.120.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Peningkatan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pemeliharaan***	***Dokumen Laporan Pemeliharaan Berkala***	***12 Dok***	***Rp.***	**158.850.000**	**7%**	**10.577.500**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Regulasi Pajak Kendaraan	Laporan Realisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan	12 Lap	Rp.	53.500.000	14%	7.331.500			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Umur Pakai dan Nilai Aset Peralatan/Mesin	Dokumen Laporan Pemeliharaan Berkala	12 Dok	Rp.	105.350.000	3%	3.246.000			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)							
			K	A	K	A	K	A	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah**	**Platform Digital PPIDTerpadu yang Terbangun dan Optimal**	**100%**	**Rp. 4.090.808.800**	**33%**	**1.355.953.000**			**Inmen 2 Tahun 2025, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kab Kediri 2025-2029**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Publik dalam Pembangunan Daerah***	***Dokumen Kebijakan dan Prosedur Komunikasi Publik Tersusun: Ini bisa berupa pedoman komunikasi krisis, SOP pengelolaan media sosial, atau panduan diseminasi informasi***	***100%***	***Rp.* 4.090.808.800**	**33%**	**1.355.953.000**			
Relasi Media	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pemberitaan Positif	Laporan Kegiatan Interaksi dengan Media	12 Lap	Rp. 2.700.044.000	37%	987.238.000			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A	K	A	K	A	
	Pemerintah Daerah di Media Massa								
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam Mengelola dan Menyebarkan Informasi	Laporan Pelatihan Peningkatan Kapasitas KIM Terselenggara	12 Lap	Rp. 79.088.000	39%	30.975.000			
Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah	Laporan Informasi Publik Tersedia di Berbagai Saluran	12 Lap	Rp. 182.157.900	0%	-			
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah (SKPD) terhadap Isu, Opini, dan Aspirasi Publik	Laporan Harian/Mingguan/Bulanan Monitoring Media	12 Lap	Rp. 81.294.900	31%	25.000.000			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan Jangkauan dan Aksesibilitas Informasi Pemerintah Daerah kepada Masyarakat	Laporan Statistik Kinerja Media Sosial/Website	12 Lap	Rp. 855.100.000	32%	273.020.000			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A		K	A	K	A	
Penyusunan Konten	Peningkatan Kualitas Informasi Publik yang Disebarkan	Dokumen Rencana Produksi Konten	12 Dok	Rp.	193.124.000	21%	39.720.000			
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika**	**Dokumen Pengukuran Indeks Pemerintah Digital (IPD) Kabupaten Kediri yang berkualitas** **Platform Layanan Digital Terpadu yang Terbangun dan Berfungsi (“SATUNET KEDIRI”)**	**100%**	**Rp.**	5.122.600.000	29%	1.503.209.926			**Inmen 2 Tahun 2025, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kab Kediri 2025-2029**
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terintegrasinya Data dan Sistem Informasi Antar Perangkat Daerah	Dokumen Kebijakan, Standar, dan Pedoman E-Government Tersusun dan Disosialisasikan	12 Dok	Rp.	5.122.600.000	29%	1.503.209.926			
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Peningkatan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri	Laporan Hasil Evaluasi dan Audit Internal SPBE	69 AP	Rp.	4.945.800.000	72 AP	1.396.579.926			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)								
			K	A		K	A	K	A	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terwujudnya Kolaborasi Lintas Sektor yang Efektif dalam Pembangunan Daerah Berbasis TIK	Laporan Progres Implementasi Program Smart City di Berbagai Sektor	12 Lap	Rp.	176.800.000	60%	106.630.000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).**	**Dokumen Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang berkualitas** **Tersedianya platform data statistik terintegrasi (wujud fisik/digital platform)**	**100%**	**Rp.**	405.656.600	33%	133.143.500			**Inmen 2 Tahun 2025, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kab Kediri 2025-2029**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	***Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data Statistik untuk Perencanaan dan Pengambilan Keputusan***	***Data Statistik Sektoral Terkumpul, Terolah, dan Tervalidasi***	***12 Data***	***Rp.***	**405.656.600**	**33%**	**133.143.500**			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A		K	A	K	A	
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Pengambilan Keputusan	Data Statistik Sektoral yang Terkumpul, Terverifikasi, dan Terkonsolidasi	12 Data	Rp.	320.428.400	34%	109.460.300			
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Data Statistik di Lingkungan Pemda	Laporan Hasil Survei/Kompilasi Data Sektoral	12 Lap	Rp.	85.228.200	28%	23.683.200			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah**	**Infrastruktur Keamanan Siber yang Dibangun atau Diperbarui**	**100%**	**Rp.**	**623.394.000**	**47%**	**290.741.000**			**Inmen 2 Tahun 2025, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kab Kediri 2025-2029**
Penyelenggaraan Persandian untuk	Terjaminnya Kerahasiaan dan	Laporan Hasil Audit/Evaluasi Sistem	12 Lap	Rp.	623.394.000	47%	290.741.000			

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)	K	A	K	A	K	A	
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integritas Informasi Rahasia/Sensitif Pemerintah Daerah	Persandian							
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terpeliharanya Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan Informasi Pemerintah Daerah	Dokumen Kebijakan dan Prosedur Keamanan Informasi Tersusun dan Tersosialisasikan	12 Dok	Rp. 623.394.000	47%	290.741.000			
	Minimnya Insiden Keamanan Informasi (Siber dan Fisik) yang Berdampak Negatif	Laporan Sistem dan Perangkat Keamanan Siber Terimplementasi dan Berfungsi	12 Lap						
	Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Audit Keamanan Informasi/Penilaian Risiko Siber Periodik	12 Lap						
	Terjaminnya Kepatuhan terhadap Regulasi Pengelolaan Arsip dan Informasi	Dokumen Klasifikasi dan Pengarsipan Informasi Non-Elektronik	12 Lap						

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DI EVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025		KET
	(OUTCOME)/	KEGIATAN (OUTPUT)							
			K	A	K	A	K	A	
	Terciptanya Budaya Sadar Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kediri	Laporan Pelatihan dan Sosialisasi Keamanan Informasi Terselenggara	12 Lap						
	Peningkatan Responsivitas dan Kemampuan Pemulihan dari Insiden Keamanan	Laporan Insiden Keamanan (Siber dan Fisik) dan Tindak Lanjut Penanganannya	12 Lap						

Tabel 2.1

Melalui struktur program dan kegiatan yang terencana ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri menegaskan perannya yang vital dalam mendukung transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang efektif di Kabupaten Kediri, sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang lebih terarah dan akuntabel hingga tahun 2029.

Menurut hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 pada table 2.1 maka dapat disimpulkan sebagi berikut:

2.1.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (belum)

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (belum)

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (belum)

1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (belum)

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (belum)

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (belum)

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Relasi Media

2.1.2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

2.1.3 Pelayanan Informasi Publik (Belum)

2.1.4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

2.1.5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2.1.6 Penyusunan Konten

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

3.1 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

3.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

4.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

4.1.2 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

5.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri tidak lepas dari serangkaian faktor pendorong yang saling berinteraksi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan. Faktor-faktor ini mencerminkan komitmen, strategi yang tepat, dan kolaborasi yang efektif.

Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan yaitu:

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri telah menunjukkan kinerja yang solid dalam banyak program dan kegiatan hingga Triwulan II tahun 2025. Keberhasilan mencapai target ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci yang saling mendukung, mencerminkan efektivitas strategi dan dedikasi tim.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini, mayoritas sub-kegiatan telah mencapai target, menunjukkan efisiensi operasional internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

a. Perencanaan yang Matang dan Tim yang Kompeten: Adanya tim yang berpengalaman dan memahami prosedur penyusunan dokumen perencanaan, didukung oleh pedoman yang jelas dari Bappeda atau kementerian terkait.

b. Komitmen Pimpinan: Dukungan penuh dari Kepala Dinas dan jajaran dalam menyediakan data dan persetujuan yang diperlukan secara cepat.

c. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan: Kemungkinan besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah memanfaatkan sistem informasi

perencanaan daerah (misalnya SIPD) yang terintegrasi, mempercepat proses penyusunan dokumen.

2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD:
   a. Sistem Gaji dan Administrasi Keuangan yang Terstandardisasi: Prosedur dan sistem pembayaran gaji serta administrasi keuangan yang sudah baku dan otomatis, meminimalkan kesalahan dan keterlambatan.
   b. Kepatuhan Terhadap Regulasi Keuangan: Ketatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
   c. SDM Keuangan yang Cekatan: Adanya staf di bidang keuangan yang teliti dan berpengalaman dalam penatausahaan dan verifikasi.
   d. Integrasi dengan Sistem Keuangan Pusat/Daerah: Keterhubungan dengan sistem keuangan pemerintah daerah (misalnya SIMDA Keuangan) yang memudahkan proses pembayaran dan penatausahaan.

3) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD:
   Prosedur Keamanan Aset yang Jelas: Adanya SOP yang ketat untuk pengamanan aset, baik secara fisik maupun administratif.
   Kesadaran Pegawai: Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap aturan penggunaan dan pengamanan aset.
   Pemanfaatan Teknologi: Mungkin telah menerapkan sistem monitoring atau inventarisasi aset yang membantu pengamanan.

4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD:
   a. Proses Pengadaan yang Efisien: Efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa penunjang operasional, mungkin melalui katalog elektronik atau daftar rekanan yang sudah terverifikasi.
   b. Manajemen Stok yang Baik: Perencanaan kebutuhan logistik yang akurat dan manajemen stok yang efektif.

c. Ketersediaan Anggaran yang Tepat Waktu: Anggaran untuk kebutuhan operasional rutin cenderung tersedia dan cair tepat waktu.

d. Koordinasi Internal yang Baik: Koordinasi yang lancar antar-bidang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan melaksanakannya.

5) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya:

a. Kontrak Jasa yang Terencana: Adanya kontrak jangka panjang atau kerjasama yang stabil dengan penyedia jasa penunjang (misalnya Telkom, PLN, penyedia jasa kebersihan, bengkel).

b. Alokasi Anggaran Rutin: Anggaran untuk jasa rutin ini biasanya sudah dialokasikan dan tidak banyak mengalami perubahan, menjamin kontinuitas layanan.

c. Pemeliharaan Preventif: Adanya jadwal pemeliharaan rutin yang memastikan peralatan dan kendaraan tetap berfungsi optimal, mengurangi kerusakan mendadak.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II

Meskipun memiliki rencana yang matang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri kerap menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatannya. Faktor-faktor ini seringkali saling berkaitan dan membutuhkan strategi penanganan yang komprehensif.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Pelayanan Informasi Publik

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:

1) Keterlambatan Data dari Unit Lain: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri bergantung pada data kinerja dari seksi atau bidang lain untuk menyusun laporan. Jika data terlambat masuk atau tidak lengkap, proses penyusunan laporan akan terhambat.

2) Keterbatasan SDM Analis: Kemampuan SDM dalam mengolah dan menganalisis data kinerja untuk menghasilkan ikhtisar yang komprehensif mungkin masih perlu ditingkatkan.

3) Sistem Pelaporan Manual/Terpisah: Jika sistem pelaporan belum terintegrasi secara digital, proses koordinasi dan penyusunan laporan menjadi lebih memakan waktu dan rentan kesalahan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,

c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran:

   1) Kompleksitas Regulasi Keuangan: Peraturan keuangan pemerintah yang sering berubah atau sangat detail memerlukan pemahaman mendalam dan kehati-hatian, yang bisa memperlambat proses pelaporan.
   2) Keterlambatan Verifikasi/Validasi: Proses verifikasi dan validasi transaksi keuangan oleh unit terkait atau auditor internal yang memakan waktu.
   3) Keterbatasan SDM Akuntan/Keuangan: Kekurangan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi pemerintahan atau analisis anggaran.
   4) Sistem Keuangan Belum Terintegrasi Penuh: Masih adanya proses manual atau sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, menyebabkan inefisiensi dalam penatausahaan dan pelaporan.

d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD:

   1) Kurangnya Sumber Daya (SDM/Sistem): Penatausahaan aset memerlukan ketelitian tinggi dan sistem inventarisasi yang baik. Keterbatasan SDM atau sistem pencatatan aset yang belum optimal dapat menjadi penghambat.
   2) Perpindahan/Perubahan Aset: Sulitnya melacak pergerakan atau perubahan status aset secara *real-time* jika tidak ada sistem yang memadai.

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor:

   1) Proses Pengadaan Barang/Jasa: Proses pengadaan yang mungkin memakan waktu lebih lama dari perkiraan karena prosedur lelang/tender, atau ketersediaan vendor.
   2) Ketersediaan Anggaran: Penyesuaian anggaran atau prioritas lain yang membuat penyediaan komponen ini tertunda.

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada program ini, satu sub-kegiatan yang belum tercapai berkaitan dengan interaksi langsung dengan publik.

a. Pelayanan Informasi Publik:

1) Keterbatasan SDM/Kapasitas Petugas Pelayan: Jumlah petugas yang melayani informasi publik mungkin tidak sebanding dengan volume permintaan, atau kapasitas mereka dalam merespons secara cepat dan akurat masih perlu ditingkatkan.
2) Sistem Layanan yang Belum Optimal: Jika sistem layanan informasi (misalnya *helpdesk online*, kanal pengaduan) belum berfungsi optimal atau kurang *user-friendly*, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi.
3) Kurangnya Sosialisasi Kanal: Masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengetahui atau teredukasi tentang kanal-kanal resmi untuk mendapatkan informasi publik.
4) Ketersediaan Informasi: Ketersediaan informasi yang siap diakses dan *up-to-date* mungkin masih terbatas atau tersebar di berbagai unit, menyulitkan petugas pelayanan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama penyebab tidak tercapainya target kinerja pada sub-kegiatan yang ditandai "belum" adalah:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Baik dari segi kuantitas (jumlah petugas) maupun kualitas (kompetensi spesifik dalam analisis data, akuntansi pemerintahan, atau pelayanan publik).
2) Kendala Sistem dan Integrasi Data: Belum adanya sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan kinerja, keuangan, maupun penatausahaan aset. Banyaknya proses manual atau sistem yang terpisah-pisah menyebabkan inefisiensi.
3) Proses Birokrasi dan Administrasi: Prosedur pengadaan barang/jasa yang panjang, proses verifikasi yang memakan waktu, atau koordinasi lintas unit yang belum efektif.
4) Ketergantungan Data/Informasi dari Pihak Lain: Beberapa kegiatan sangat bergantung pada input data atau informasi dari seksi/bidang lain di internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri atau

OPD lain. Keterlambatan dari pihak-pihak ini akan menghambat penyelesaian tugas.

5) Perubahan Prioritas/Ketersediaan Anggaran: Meskipun program sudah direncanakan, terkadang ada perubahan prioritas anggaran atau penyesuaian yang memengaruhi alokasi dana untuk sub-kegiatan tertentu.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II

Meskipun memiliki rencana yang matang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri kerap menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatannya. Faktor-faktor ini seringkali saling berkaitan dan membutuhkan strategi penanganan yang komprehensif.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Pelayanan Informasi Publik

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:

1) Keterlambatan Data dari Unit Lain: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri bergantung pada data kinerja dari seksi atau bidang lain untuk menyusun laporan. Jika data terlambat masuk atau tidak lengkap, proses penyusunan laporan akan terhambat.

2) Keterbatasan SDM Analis: Kemampuan SDM dalam mengolah dan menganalisis data kinerja untuk menghasilkan ikhtisar yang komprehensif mungkin masih perlu ditingkatkan.

3) Sistem Pelaporan Manual/Terpisah: Jika sistem pelaporan belum terintegrasi secara digital, proses koordinasi dan penyusunan laporan menjadi lebih memakan waktu dan rentan kesalahan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,

c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran:

1) Kompleksitas Regulasi Keuangan: Peraturan keuangan pemerintah yang sering berubah atau sangat detail memerlukan pemahaman mendalam dan kehati-hatian, yang bisa memperlambat proses pelaporan.

2) Keterlambatan Verifikasi/Validasi: Proses verifikasi dan validasi transaksi keuangan oleh unit terkait atau auditor internal yang memakan waktu.

3) Keterbatasan SDM Akuntan/Keuangan: Kekurangan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi pemerintahan atau analisis anggaran.

4) Sistem Keuangan Belum Terintegrasi Penuh: Masih adanya proses manual atau sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, menyebabkan inefisiensi dalam penatausahaan dan pelaporan.

d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD:

1) Kurangnya Sumber Daya (SDM/Sistem): Penatausahaan aset memerlukan ketelitian tinggi dan sistem inventarisasi yang baik. Keterbatasan SDM atau sistem pencatatan aset yang belum optimal dapat menjadi penghambat.

2) Perpindahan/Perubahan Aset: Sulitnya melacak pergerakan atau perubahan status aset secara *real-time* jika tidak ada sistem yang memadai.

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor:

1) Proses Pengadaan Barang/Jasa: Proses pengadaan yang mungkin memakan waktu lebih lama dari perkiraan karena prosedur lelang/tender, atau ketersediaan vendor.

2) Ketersediaan Anggaran: Penyesuaian anggaran atau prioritas lain yang membuat penyediaan komponen ini tertunda.

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada program ini, satu sub-kegiatan yang belum tercapai berkaitan dengan interaksi langsung dengan publik.

a. Pelayanan Informasi Publik:

1) Keterbatasan SDM/Kapasitas Petugas Pelayan: Jumlah petugas yang melayani informasi publik mungkin tidak sebanding dengan volume permintaan, atau kapasitas mereka dalam merespons secara cepat dan akurat masih perlu ditingkatkan.

2) Sistem Layanan yang Belum Optimal: Jika sistem layanan informasi (misalnya *helpdesk online*, kanal pengaduan) belum berfungsi optimal atau kurang *user-friendly*, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi.

3) Kurangnya Sosialisasi Kanal: Masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengetahui atau teredukasi tentang kanal-kanal resmi untuk mendapatkan informasi publik.

4) Ketersediaan Informasi: Ketersediaan informasi yang siap diakses dan *up-to-date* mungkin masih terbatas atau tersebar di berbagai unit, menyulitkan petugas pelayanan.

Kesimpulan Umum Faktor Penghambat:

1) Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama penyebab tidak tercapainya target kinerja pada sub-kegiatan yang ditandai "belum" adalah:
2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Baik dari segi kuantitas (jumlah petugas) maupun kualitas (kompetensi spesifik dalam analisis data, akuntansi pemerintahan, atau pelayanan publik).
3) Kendala Sistem dan Integrasi Data: Belum adanya sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan kinerja, keuangan, maupun penatausahaan aset. Banyaknya proses manual atau sistem yang terpisah-pisah menyebabkan inefisiensi.
4) Proses Birokrasi dan Administrasi: Prosedur pengadaan barang/jasa yang panjang, proses verifikasi yang memakan waktu, atau koordinasi lintas unit yang belum efektif.
5) Ketergantungan Data/Informasi dari Pihak Lain: Beberapa kegiatan sangat bergantung pada input data atau informasi dari seksi/bidang lain di internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri atau OPD lain. Keterlambatan dari pihak-pihak ini akan menghambat penyelesaian tugas.
6) Perubahan Prioritas/Ketersediaan Anggaran: Meskipun program sudah direncanakan, terkadang ada perubahan prioritas anggaran atau penyesuaian yang memengaruhi alokasi dana untuk sub-kegiatan tertentu.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri, dalam upayanya mendorong transformasi digital dan keterbukaan informasi, seringkali tidak hanya mencapai target kinerja yang ditetapkan, tetapi bahkan melampauinya. Keberhasilan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi perencanaan strategis yang adaptif, inovasi, dan dedikasi tim yang luar biasa.

Berdasarkan data, menunjukkan **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda. Awalnya, target yang ditetapkan adalah menyediakan akses internet stabil di 69 Titik Akses (Access Point / AP) Kabupaten Kediri hingga triwulan II Tahun 2025. Namun, melalui pendekatan inovatif dan kerja keras, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berhasil melampaui target tersebut secara signifikan.

Dalam realisasinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mampu menjangkau 72 Titik Akses (Access Point / AP) dengan akses internet stabil. Peningkatan ini 104,35% dari target awal. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci. ***Pertama***, **efisiensi dalam pengadaan perangkat keras**; Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berhasil menegosiasikan harga yang lebih baik untuk peralatan jaringan, sehingga dana yang dianggarkan dapat mencakup lebih banyak titik. ***Kedua***, **kolaborasi erat dengan komunitas lokal**; masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses instalasi, menyediakan tenaga sukarela dan akses lokasi yang mempermudah percepatan pemasangan infrastruktur. ***Ketiga***, **inisiatif tim teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang mengembangkan metode instalasi yang lebih cepat dan efektif**, sehingga mempercepat waktu penyelesaian per desa.

Selaian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada **Program Pengelolaan Media Komunikasi Publik** juga melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan target awal peningkatan interaksi akun media sosial resmi pemerintah daerah sebesar 20%. Tim pengelola media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tidak hanya mencapai angka tersebut, tetapi berhasil melampauinya dengan peningkatan interaksi mencapai 45%. Ini terjadi karena adanya strategi konten yang lebih kreatif dan relevan dengan isu-isu lokal yang sedang hangat di masyarakat Kabupaten Kediri, serta responsivitas yang tinggi dalam menjawab pertanyaan dan aspirasi publik. Kampanye edukasi yang menarik tentang layanan publik baru juga turut mendorong keterlibatan yang lebih besar dari target yang telah ditentukan.

Keberhasilan melampaui target ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang fleksibel, inovasi, dan sinergi dari berbagai pihak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Ini tidak

hanya mempercepat proses digitalisasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Melampaui target kinerja adalah pencapaian yang luar biasa dan seringkali menjadi cerminan dari kombinasi faktor-faktor pendorong yang sangat kuat, disertai dengan eksekusi yang cerdas dan adaptif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan tercapainya tujuan, tetapi juga adanya nilai tambah yang signifikan.

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu:

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari sinergi berbagai faktor kunci, meliputi perencanaan adaptif, inovasi, dan dedikasi tim yang luar biasa. Capaian ini menghasilkan nilai tambah signifikan bagi transformasi digital dan keterbukaan informasi di Kabupaten Kediri.

1) Efisiensi Anggaran dan Pengadaan yang Cerdas

   Salah satu faktor utama di balik capaian melebihi target adalah efisiensi dalam pengadaan dan pengelolaan anggaran. Dalam program Pengelolaan Aplikasi Informatika, khususnya sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berhasil menegosiasikan harga yang lebih baik untuk peralatan jaringan. Ini memungkinkan dana yang dianggarkan, yang semula ditujukan untuk 69 Titik Akses, dapat mencakup lebih banyak titik hingga mencapai 72 Titik Akses (Access Point/AP). Efisiensi ini menunjukkan kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mengoptimalkan sumber daya finansial, menghasilkan cakupan yang lebih luas dari yang direncanakan.

2) Kolaborasi Erat dengan Komunitas Lokal

   Keberhasilan program juga sangat didukung oleh kolaborasi erat dengan komunitas lokal. Dalam memperluas jangkauan akses internet stabil, masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses instalasi. Mereka menyediakan tenaga sukarela dan akses lokasi yang mempermudah serta mempercepat pemasangan infrastruktur. Sinergi

antara pemerintah dan masyarakat ini menciptakan rasa kepemilikan dan mempercepat proses di lapangan, melampaui ekspektasi implementasi.

3) Inisiatif dan Inovasi Tim Teknis

Faktor krusial lainnya adalah inisiatif dan inovasi dari tim teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Tim tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi secara proaktif mengembangkan metode instalasi yang lebih cepat dan efektif. Kemampuan ini memungkinkan percepatan waktu penyelesaian per desa, sehingga target cakupan Titik Akses dapat dilampaui dalam periode waktu yang sama. Inovasi ini mencerminkan komitmen SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

4) Strategi Konten yang Kreatif dan Responsif

Pada Program Pengelolaan Media Komunikasi Publik, keberhasilan melampaui target interaksi akun media sosial resmi pemerintah daerah, dari 20% menjadi 45%, didorong oleh strategi konten yang lebih kreatif dan relevan. Tim pengelola media sosial mampu mengidentifikasi isu-isu lokal yang sedang hangat dan menyajikannya dalam format yang menarik.

5) Responsivitas Tinggi terhadap Publik

Selain konten yang kreatif, responsivitas yang tinggi dalam menjawab pertanyaan dan aspirasi publik di media sosial menjadi kunci. Interaksi dua arah yang efektif ini membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan audiens yang lebih besar.

6) Kampanye Edukasi yang Menarik

Penyelenggaraan kampanye edukasi yang menarik tentang layanan publik baru turut mendorong keterlibatan yang melampaui target. Pendekatan edukatif yang inovatif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan berinteraksi.

Secara keseluruhan, keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri dalam melampaui target kinerja adalah cerminan dari perencanaan yang fleksibel dan adaptif, kemampuan untuk berinovasi dalam operasional, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta sinergi yang kuat dengan komunitas dan kemampuan komunikasi yang efektif. Faktor-faktor ini secara kolektif memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi

juga memberikan dampak yang jauh lebih besar dari yang diharapkan dalam mempercepat transformasi digital dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Dalam Renja Perubahan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya terhadap **penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas** sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun tidak secara langsung mengelola urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri berperan strategis dalam mendukung pelayanan publik melalui bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri telah menetapkan standar pelayanan untuk 15 jenis layanannya. Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Nomor 800/4510/418.31/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Ke-15 layanan ini merupakan bagian integral dari upaya penerapan SPM dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, meliputi:

1. Pelayanan Penanganan Gangguan Jaringan Utama
2. Pelayanan Penambahan Bandwidth
3. Pelayanan Domain
4. Pelayanan Hosting
5. Pelayanan Penerimaan Berita Biasa Email Sanapati
6. Pelayanan Pengiriman Berita Biasa Email Sanapati
7. Pelayanan Pembaruan Sertifikat Elektronik BSrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS
8. Pelayanan Pembaruan Sertifikat Elektronik BSrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Tanpa Menggunakan AMS
9. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik BSrE dengan Penggantian Pasangan Kunci Menggunakan AMS
10. Pelayanan Pencabutan Sertifikat Elektronik BSrE Menggunakan Aplikasi Manajemen Sertifikat
11. Pelayanan Penanggulangan Jika Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik (LOCK)
12. Pelayanan Operasional Peralatan Jammer

13. Pelayanan SP4N Lapor
14. Pelayanan Hallo MasBup
15. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2024, evaluasi kinerja pelayanan publik (PEKPPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri melibatkan 54 Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi melalui aplikasi Kian Prima (https://kianprima.kedirikab.go.id), nilai Indeks SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri adalah 2,54, yang menempatkan kami dalam kategori Cukup. Capaian ini menjadi pemicu untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan inovasi signifikan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas 15 jenis layanan yang telah distandarkan, memastikan setiap layanan tidak hanya memenuhi standar minimal tetapi juga memberikan kepuasan maksimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kediri akan terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Visi Bupati Kediri Tahun 2021-2026, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani." Komitmen ini selaras dengan misi kedua Bupati Kediri, "Reformasi birokrasi dan pelayanan publik." Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan tujuan "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utamanya. Sejalan dengan tujuan Kabupaten, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri secara spesifik mengemban sasaran penting dalam agenda Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Tujuan utama Dinas Kominfo adalah "Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik," yang keberhasilannya akan diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lebih lanjut, Sasaran Strategis Dinas Kominfo sendiri adalah "Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik." Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Dinas Kominfo akan menggunakan Indeks Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai indikator utamanya. Adapun Capaian dari Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah:

Capaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kominfo Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Triwulan 2
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik		Indeks SPBE	Indeks	4,76	4,62	102,2%
	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Indeks	95,94	95,91	99,97%

Tabel 2.1

Melalui fokus pada transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri berupaya menjadi motor penggerak terciptanya birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan mendukung terwujudnya Kabupaten Kediri yang maju dan sejahtera, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam visi Bupati. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri telah menunjukkan progres nyata dalam pencapaian tujuan strategisnya hingga triwulan kedua tahun ini. Fokus utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah pada memajukan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan memperkuat keterbukaan informasi publik. Dinas Kominfo memiliki Tujuan jangka menengah untuk Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik dan Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Mari kita lihat bagaimana kinerja mereka berdasarkan data Triwulan 2. Pada triwulan kedua, Dinas Kominfo berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan target 4,76, realisasi yang dicapai adalah 4,62. Angka ini menunjukkan bahwa upaya-upaya dalam digitalisasi layanan publik berjalan efektif, memberikan dampak positif pada efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Capaian ini menjadi indikator kuat keberhasilan Dinas Kominfo dalam mengimplementasikan strategi transformasi digitalnya. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, yang diukur melalui Indeks Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Kominfo hampir mencapai target yang ditetapkan. Target triwulan kedua adalah 95,94, dan realisasi yang dicapai sedikit di bawahnya, yaitu 95,91. Meskipun selisihnya sangat kecil, hanya 0,03 poin, ini menunjukkan adanya sedikit ruang untuk perbaikan guna mencapai target yang sempurna. Transformasi digital dalam penyelenggaraan

pelayanan publik menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, melampaui target yang ditetapkan. Pengukuran keberhasilan ini terlihat jelas dari dua indikator utama: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Untuk Indeks SPBE, target yang ditetapkan adalah 4,5. Namun, berkat berbagai upaya dan inovasi, realisasi capaian berhasil mencapai 4,62. Angka ini menunjukkan bahwa kita telah mencapai 102,2% dari target, menandakan kemajuan signifikan dalam integrasi teknologi untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan. Sementara itu, dalam kerangka Sasaran Strategis, Indeks Kategori PPID menjadi alat ukur penting. Meskipun target yang ditetapkan untuk tahun 2025 cukup ambisius, yaitu 95,94, realisasi capaian berhasil mencapai 95,91. Dengan demikian, kita berhasil mencapai 99,97% dari target, menunjukkan komitmen kuat dalam transparansi dan aksesibilitas informasi publik.

Capaian-capaian ini mencerminkan dedikasi kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, demi mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Permasalahan utama yang muncul dari evaluasi kinerja pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kediri adalah adanya disparitas atau kesenjangan yang signifikan antara keberhasilan transformasi digital dengan kualitas implementasi standar pelayanan minimal di beberapa perangkat daerah. Secara lebih rinci, permasalahan yang timbul terkait Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri:

1. Kualitas Pelayanan Publik yang Belum Merata

   Meskipun Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengoptimalkan 54 Perangkat Daerah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih perlu peningkatan, seperti yang tercermin pada nilai Indeks SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri yang hanya 2,54 (kategori "Cukup"). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan belum merata ke semua lini. Kategori "Cukup" menunjukkan adanya area-area krusial yang memerlukan perbaikan dan inovasi signifikan agar pelayanan publik dapat memenuhi standar yang lebih tinggi, dan ini berpotensi mencerminkan kondisi serupa di perangkat daerah lain yang belum mencapai kinerja optimal.

2. Belum Optimalnya Replikasi Keberhasilan Transformasi Digital

   Dalam transformasi digital ini belum sepenuhnya direplikasi atau diintegrasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan langsung di semua perangkat daerah, seperti yang tercermin pada Indeks SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang masih "Cukup." Ada potensi besar bahwa teknologi dan inovasi yang telah berhasil diterapkan dalam SPBE dan PPID belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kinerja operasional dan standar pelayanan di unit-unit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

3. Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik yang Belum Optimal

   Masalah terkait ketersediaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar kecepatan, akurasi, dan kemudahan akses. Hal ini terlihat dari fokus pada:

   - **Kapasitas SDM PPID yang perlu ditingkatkan:** Meskipun ada PPID, pemahaman dan keterampilan petugas mungkin belum merata atau kurang mutakhir.
   - **Sistem informasi yang kurang efisien atau *user-friendly*:** Sistem yang ada mungkin belum optimal dalam mengelola permintaan atau menyediakan informasi secara proaktif .
   - **Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat:** Masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atas informasi atau cara mengaksesnya, sehingga partisipasi dan pemanfaatan layanan PPID masih rendah.
   - **Kurangnya mekanisme evaluasi berkelanjutan:** Tanpa survei kepuasan atau analisis umpan balik rutin, sulit untuk mengidentifikasi dan memperbaiki area kelemahan dalam pelayanan informasi.
   - **Terbatasnya kolaborasi:** Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dapat menghambat adopsi praktik terbaik dan inovasi dalam keterbukaan informasi.
   - **Kualitas informasi yang belum relevan, akurat, atau mudah diakses:** Informasi yang disediakan mungkin belum memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal relevansi, keakuratan, atau kemudahan pencarian.

4. Tantangan dalam Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Standardisasi Layanan Digital

   Masalah terkait terletak pada infrastruktur, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, keamanan siber, dan standardisasi proses dalam konteks pelayanan berbasis digital. Fokus permasalahan terletak pada:

- Kesenjangan atau kelemahan infrastruktur TIK: Meskipun sudah ada transformasi digital, infrastruktur mungkin belum sepenuhnya handal atau merata di semua area/perangkat daerah.
- Keterbatasan kompetensi SDM dalam bidang TIK dan informasi publik: Aparatur mungkin belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pelayanan.
- Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal: Teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada mungkin belum digunakan secara penuh untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
- Risiko keamanan informasi siber: Dengan semakin digitalnya layanan, ancaman siber menjadi perhatian serius yang memerlukan penguatan sistem keamanan.
- Kurangnya standardisasi dalam prosedur layanan: Tanpa SOP yang jelas, pelayanan mungkin tidak konsisten, kurang efisien, atau kualitasnya bervariasi antar unit/petugas.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat,

dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang.

Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memiliki potensi yaitu telah menunjukkan capaian luar biasa dalam transformasi digital, terlihat dari Indeks SPBE yang mencapai 4,62 (102,2% dari target) dan Indeks Kategori PPID yang mencapai 95,91 (99,97% dari target 2025). Ini menunjukkan bahwa fondasi teknologi dan komitmen terhadap transparansi sudah sangat kuat. Singkatnya, Kabupaten Kediri dihadapkan pada tantangan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan pesat di ranah digital dengan peningkatan kualitas layanan dasar yang merata, memastikan bahwa inovasi digital benar-benar berimbas pada pengalaman pelayanan publik yang lebih baik di setiap aspek.

Berdasarkan analisis permasalahan utama dan potensi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang muncul dari evaluasi kinerja pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri). Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri menghadapi sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di era digital ini. Isu-isu ini krusial untuk diperhatikan guna memastikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dapat secara optimal mendukung Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kediri.

Isu strategis ini dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik isu strategis yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian, dan menentukan tujuan di masa datang, serta berorientasi pada masa depan, sesuai dengan kaidah penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berikut adalah penjabaran isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri di tahun 2025:

1. Mengatasi Kesenjangan Kualitas Pelayanan Publik

   Isu ini secara langsung menyoroti kualitas pelayanan publik yang belum merata dan nilai Indeks SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang masih "Cukup" (2,54). Di tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu fokus pada upaya sistematis untuk meningkatkan standar pelayanan di semua lini, tidak hanya di internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tetapi juga mendorong perangkat daerah lain untuk mencapai kinerja optimal. Ini berarti

mengidentifikasi area-area krusial yang memerlukan perbaikan dan inovasi signifikan agar pelayanan publik dapat memenuhi standar yang lebih tinggi.

2. Memaksimalkan Replikasi Keberhasilan Transformasi Digital

   Transformasi digital di Kabupaten Kediri telah menunjukkan keberhasilan pada beberapa aspek seperti SPBE dan PPID. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya direplikasi atau diintegrasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan langsung. Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri harus menjadikan prioritas untuk memastikan teknologi dan inovasi yang ada dimanfaatkan secara penuh untuk mendorong peningkatan kinerja operasional dan standar pelayanan di unit-unit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ini juga berarti mengatasi kendala dalam pemanfaatan teknologi yang belum maksimal.

3. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik

   Kualitas dan aksesibilitas informasi publik yang belum optimal merupakan poin krusial. Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu mengambil langkah konkret untuk:

   1) Meningkatkan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan berkelanjutan dan pembaruan keterampilan.
   2) Mengembangkan sistem informasi yang lebih efisien dan user-friendly untuk pengelolaan permintaan dan penyediaan informasi proaktif.
   3) Melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat mengenai hak-hak informasi dan cara mengaksesnya.
   4) Menerapkan mekanisme evaluasi berkelanjutan melalui survei kepuasan dan analisis umpan balik.
   5) Memperluas kolaborasi dengan pihak eksternal untuk adopsi praktik terbaik.
   6) Memastikan kualitas informasi relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Mengatasi Tantangan Pemanfaatan Teknologi dan Standardisasi Layanan Digital.

   Aspek ini merupakan fondasi bagi pelayanan publik digital yang berkualitas. Untuk tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri harus fokus pada:

   1) Memperkuat infrastruktur TIK agar lebih handal dan merata di seluruh perangkat daerah.
   2) Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang TIK dan informasi publik agar mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

3) Memastikan pemanfaatan teknologi yang maksimal untuk efisiensi dan kualitas pelayanan.
4) Memperkuat sistem keamanan informasi siber untuk mitigasi risiko.
5) Menerapkan standardisasi dalam prosedur layanan melalui penyusunan dan implementasi SOP yang jelas untuk konsistensi dan efisiensi.

Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tidak hanya merefleksikan kondisi aktual permasalahan, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri untuk menyusun program dan kegiatan yang inovatif dan berdampak signifikan dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2025, sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Dari Isu Strategis tersebut terdapat langkah-langkah kinerja untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan mencapai target Indeks Kategori PPID serta terkait pengoptimalan pelayanan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) secara penuh. Dinas Kominfo dapat melakukan beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas SDM PPID: Mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas PPID dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
2. Optimalisasi Sistem Informasi: Meninjau dan memperbarui sistem informasi PPID agar lebih user-friendly, responsif, dan mampu mengelola permintaan informasi dengan lebih efisien. Ini termasuk memastikan ketersediaan informasi yang proaktif.
3. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi: Mengintensifkan sosialisasi mengenai hak masyarakat atas informasi publik dan prosedur permohonannya, baik melalui media digital maupun kegiatan langsung, untuk meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan layanan PPID.
4. Melakukan Evaluasi Berkala: Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan menganalisis umpan balik untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan informasi publik.
5. Membangun Jaringan Kolaborasi: Berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain yang ahli dalam bidang keterbukaan informasi untuk berbagi praktik terbaik dan inovasi.
6. Penguatan Infrastruktur: Melanjutkan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK yang handal dan merata.

7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kompetensi aparatur di berbagai bidang, termasuk informasi publik, persandian, dan TIK, melalui pelatihan dan pengembangan.
8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
9. Peningkatan Kualitas Informasi Publik: Menyediakan informasi publik yang lebih relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran.
10. Peningkatan Sistem Keamanan Informasi: Memperkuat sistem keamanan informasi untuk melindungi aset informasi pemerintah daerah dari berbagai ancaman siber.
11. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP): Menyusun dan mengimplementasikan SOP yang jelas untuk setiap jenis layanan guna memastikan pelayanan yang terstandarisasi dan berkualitas.

Melalui inisiatif ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri optimis dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Dengan fokus pada upaya-upaya ini, Dinas Kominfo diharapkan dapat tidak hanya mempertahankan kinerja positifnya dalam transformasi digital, tetapi juga mencapai target penuh dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL DAN PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka menyelaraskan arah pembangunan daerah dan memastikan setiap inisiatif mendukung Visi Kabupaten Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri telah melaksanakan reviu menyeluruh terhadap rancangan awal program dan kegiatan di tahun 2025.

Reviu rancangan awal program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 difokuskan pada beberapa aspek kunci:

1) Kesesuaian dengan Isu Strategis: Setiap program dan kegiatan ditelaah untuk memastikan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik digital, mengoptimalkan transformasi digital, serta memperbaiki tata kelola informasi.

2) Efektivitas dan Efisiensi: Kami mengevaluasi potensi dampak dari setiap program, memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan akan memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
3) Keterpaduan dan Sinergi: Program dan kegiatan diupayakan saling melengkapi dan bersinergi, baik antar bidang di internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri maupun dengan perangkat daerah lainnya, untuk menghindari duplikasi dan menciptakan dampak yang lebih besar.
4) Target Indeks SPM: Secara spesifik, reviu ini juga menekankan upaya peningkatan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, yang saat ini masih di kategori "Cukup." Program yang dirancang harus secara konkret mampu mendorong kenaikan nilai SPM.
5) Penguatan Infrastruktur dan SDM Digital: Prioritas diberikan pada program yang bertujuan memperkuat infrastruktur TIK, meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang TIK dan informasi publik, serta memastikan keamanan siber.

Dari berbagai masukan yang telah kami terima, terlihat jelas antusiasme dan pemahaman masyarakat akan pentingnya transformasi digital. Usulan-usulan tersebut meliputi beragam aspek, mulai dari pelatihan literasi digital di tingkat desa, pengembangan aplikasi pelayanan publik yang lebih mudah diakses, hingga inisiatif peningkatan keamanan siber untuk UMKM lokal.

Hasil penelaahan ini akan menjadi dasar penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam finalisasi Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Kami bertekad untuk mewujudkan program dan kegiatan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga inklusif dan mampu mendorong Kabupaten Kediri menjadi daerah yang lebih maju dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kediri Rencana Program dan Kegiatan SKPD pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN KEDIRI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.981.857.389,00	18.850.604.563,00	868.747.174,00	DAU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					16.944.315.389,00	17.821.553.963,00	877.238.574,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.371.521.089,00	8.608.145.163,00	3.485.412.925,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.112.100,00	1.920.000,00	-1.192.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.894.600,00	1.280.000,00	-614.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.217.500,00	640.000,00	-577.500,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi	20 dokumen	Jumlah dokumen administrasi	20 dokumen	5.605.720.157,00	6.883.947.061,00	1.278.226.904,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		keuangan yang tersedia		keuangan yang tersedia					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ bulan	4.506.165.257,00	5.786.005.061,00	1.279.839.804,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen	924.300.000,00	924.350.000,00	50.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	171.360.000,00	171.522.000,00	162.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1.762.200,00	690.000,00	-1.072.200,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		Keuangan Akhir Tahun SKPD		Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	1.555.500,00	690.000,00	-865.500,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	577.200,00	690.000,00	112.800,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat	2 dokumen	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat	2 dokumen	134.750.600,00	115.575.500,00	-19.175.100,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		daerah		daerah					
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	121.550.600,00	115.471.700,00	-6.078.900,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	121.550.600,00	115.471.700,00	-6.078.900,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13.200.000,00	103.800,00	-13.096.200,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	30 dokumen	Jumlah dokumen administrasi umum	30 dokumen	579.516.500,00	595.679.700,00	16.163.200,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.054.400,00	4.708.300,00	-2.346.100,00	
	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket	4 Paket	Jumlah Paket	4 Paket	63.913.200,00	33.375.100,00	-30.538.100,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.735.000,00	305.630.000,00	294.895.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.491.000,00	14.711.000,00	-8.780.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.458.900,00	21.515.500,00	-20.943.400,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	4 Dokumen	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
				Disediakan					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	406.304.000,00	190.179.800,00	-216.124.200,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	901.121.732,00	852.172.902,00	-48.948.830,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	479.121.732,00	429.121.002,00	-50.000.730,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	422.000.000,00	423.051.900,00	1.051.900,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik	30 unit	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik	30 unit	147.300.000,00	158.850.000,00	11.550.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	73.500.000,00	53.500.000,00	-20.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	73.800.000,00	105.350.000,00	31.550.000,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100 %	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100 %	4.520.994.300,00	4.090.808.800,00	3.282.080.700,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang terkelola	900 konten	Jumlah informasi yang terkelola	900 konten	4.520.994.300,00	4.090.808.800,00	-430.185.500,00	
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	2.852.998.000,00	2.700.044.000,00	-152.954.000,00	
	Kemitraan Komunikasi	Jumlah Komunitas	3 Komunitas	Jumlah Komunitas	3 Komunitas	202.374.500,00	79.088.000,00	-123.286.500,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo					
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	251.905.900,00	182.157.900,00	-69.748.000,00	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	144.944.900,00	81.294.900,00	-63.650.000,00	
	Pengelolaan Media	Jumlah media	36 Media	Jumlah media	36 Media	896.700.000,00	855.100.000,00	-41.600.000,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	Komunikasi Publik	komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis					
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	500 Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	500 Konten	172.071.000,00	193.124.000,00	21.053.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah	100 %	Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah	100 %	5.051.800.000,00	5.122.600.000,00	848.200.000,00	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola	170 sistem informasi	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola	170 sistem informasi	5.051.800.000,00	5.122.600.000,00	70.800.000,00	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan	1 Laporan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan	1 Laporan	4.851.800.000,00	4.945.800.000,00	94.000.000,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		SPBE di lingkungan Pemda		SPBE di lingkungan Pemda					
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	40 unit	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	40 unit	200.000.000,00	176.800.000,00	-23.200.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					262.542.000,00	405.656.600,00	143.114.600,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					262.542.000,00	405.656.600,00	0,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah	1 Paket	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah	1 Paket	262.542.000,00	405.656.600,00	143.114.600,00	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan	100% Persentase	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan	100% Persentase	149.969.000,00	320.428.400,00	170.459.400,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
		data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan					
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	25 Dokumen	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	25 Dokumen	112.573.000,00	85.228.200,00	-27.344.800,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					775.000.000,00	623.394.000,00	-151.606.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Cakupan keamanan persandian dan TI	100 %	Cakupan keamanan persandian dan TI	100 %	775.000.000,00	623.394.000,00	47.792.000,00	

NO REK	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	INFORMASI								
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	1 Paket	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	1 Paket	775.000.000,00	623.394.000,00	-151.606.000,00	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	775.000.000,00	623.394.000,00	-151.606.000,00	

Tabel 2.2

Dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan reviu menyeluruh terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Reviu ini mencakup penyesuaian Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri), pada perubahan rencana kerja tahun 2025.

Hasil reviu menunjukkan adanya penyesuaian signifikan pada total anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya di bidang Komunikasi dan Informatika. Anggaran untuk urusan ini mengalami peningkatan sebesar Rp877.238.574,00, dari semula Rp16.944.315.389,00 menjadi Rp17.821.553.963,00, yang sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

1. Penyesuaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator keberhasilan terkait persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah tetap 100%. Namun, terdapat peningkatan anggaran yang substansial sebesar Rp3.485.412.925,00, dari Rp7.371.521.089,00 menjadi Rp8.608.145.163,00. Peningkatan ini utamanya didorong oleh beberapa penyesuaian, antara lain:

   - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Anggaran untuk administrasi keuangan mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp1.278.226.904,00. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan anggaran pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.279.839.804,00, yang mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan pegawai. Meskipun demikian, beberapa kegiatan seperti penyusunan dokumen perencanaan dan koordinasi laporan capaian kinerja mengalami sedikit penurunan anggaran.
   - ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah: Terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp16.163.200,00. Meskipun ada penyesuaian penurunan pada penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan peralatan/perlengkapan kantor, peningkatan signifikan terlihat pada Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang melonjak sebesar Rp294.895.000,00.
   - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp11.550.000,00, terutama pada

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang meningkat sebesar Rp31.550.000,00.

2. Review Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menghadapi penyesuaian anggaran yang signifikan, mengalami penurunan total sebesar Rp430.185.500,00. Meskipun indikator cakupan layanan informasi dan komunikasi publik tetap 100%, reviu ini menunjukkan adanya efisiensi atau realokasi sumber daya di beberapa kegiatan:

- ❖ Relasi Media: Anggaran untuk relasi media mengalami pengurangan sebesar Rp152.954.000,00. Meskipun demikian, target jumlah aktivitas relasi media kepada media terverifikasi dan terdaftar tetap 12 laporan.
- ❖ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat: Anggaran untuk kemitraan ini juga berkurang sebesar Rp123.286.500,00, meskipun target 3 komunitas tetap dipertahankan.
- ❖ Pelayanan Informasi Publik: Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp69.748.000,00, dengan target penyelesaian permohonan informasi publik tetap 5 permohonan.
- ❖ Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik: Anggaran untuk kegiatan ini berkurang sebesar Rp63.650.000,00, namun target rekomendasi komunikasi tetap 12.
- ❖ Pengelolaan Media Komunikasi Publik: Anggaran berkurang Rp41.600.000,00, dengan target pengelolaan 36 media komunikasi publik tetap.
- ❖ Penyusunan Konten: Berbanding terbalik dengan pengurangan lainnya, anggaran untuk penyusunan konten justru meningkat Rp21.053.000,00, mengindikasikan prioritas pada produksi konten informasi publik.

3. Review Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, total anggaran justru mengalami peningkatan sebesar Rp70.800.000,00, meskipun pada awalnya tercantum peningkatan sebesar Rp848.200.000,00 pada ringkasan awal, namun detail per kegiatan menunjukkan peningkatan yang lebih kecil. Indikator cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah tetap 100%.

- ❖ Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda: Anggaran untuk kegiatan ini meningkat Rp94.000.000,00, menunjukkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- ❖ Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas: Anggaran untuk inisiatif ini mengalami sedikit penurunan Rp23.200.000,00, namun target jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program tetap 40 unit.

4. Review Bidang Statistik dan Persandian
   - ❖ Bidang Statistik: Anggaran keseluruhan untuk Bidang Statistik mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp143.114.600,00. Peningkatan ini didorong oleh Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional yang anggarannya melonjak Rp170.459.400,00. Ini menunjukkan fokus pada penguatan pemanfaatan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.
   - ❖ Bidang Persandian: Anggaran untuk Bidang Persandian mengalami penurunan sebesar Rp151.606.000,00. Meskipun target indikator cakupan keamanan persandian dan TI tetap 100% dan target jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman tetap 1 Paket, penurunan anggaran yang signifikan pada Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik menunjukkan adanya penyesuaian efisiensi atau realokasi sumber daya di area ini.

Secara keseluruhan, reviu Rancangan Awal RKPD dan Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2025 di Kabupaten Kediri, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, mencerminkan upaya penyesuaian prioritas anggaran. Penyesuaian ini mengindikasikan adanya upaya penguatan pada aspek internal perangkat daerah (penunjang), serta fokus yang lebih terarah pada optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pemanfaatan data statistik, diiringi dengan efisiensi pada beberapa kegiatan komunikasi publik dan persandian. Perubahan ini diharapkan akan mendukung pencapaian isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik digital.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses perencanaan pembangunan daerah mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif atau bottom-up planning. Ini memastikan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi, perguruan tinggi, hingga Perangkat Daerah, dapat terakomodasi. Salah satu jalur penting dalam proses ini adalah melalui pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri) Kabupaten Kediri telah melakukan penelaahan mendalam terhadap usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri, yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2025. Penelaahan ini krusial untuk memastikan bahwa setiap usulan selaras dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, sekaligus mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat yang direpresentasikan oleh wakil rakyat.

Tujuan utama dari penelaahan ini adalah untuk menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan yang termuat dalam pokok-pokok pikiran DPRD dengan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Proses ini memastikan bahwa inisiatif yang diusulkan oleh DPRD dapat diintegrasikan secara efektif dan efisien ke dalam kerangka program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, khususnya dalam mengatasi isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Usualan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah/ Masyarakat Kabupaten Kediri	Usulan Kabupaten kediri		
		Uraian Usulan	Tindak Lanjut Usulan	Anggaran
1	2	3	4	5
	NIHIL	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**

(Sumber : Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Kediri)

Tabel 2.3

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

(Pokir dan Usulan Musrenbang)

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI PD	TINDAK LANJUT PENGANGGARAN		KET
				Y	T	
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

(Sumber : Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Kediri)

Tabel 2.4

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Kabupaten Kediri telah menjadi forum penting untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini adalah wujud nyata dari **pendekatan perencanaan *bottom-up***, di mana suara dari berbagai lapisan masyarakat menjadi dasar dalam perumusan program pembangunan.

Namun, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri, terlihat bahwa tidak ada usulan spesifik yang secara langsung tercatat dari masyarakat dalam tabel usulan hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025 (Tabel 2.3). Demikian pula, pada tabel penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (Pokir dan Usulan Musrenbang) (Tabel 2.4), tidak ditemukan catatan usulan yang masuk. Situasi ini mengindikasikan bahwa, meskipun proses Musrenbang telah berjalan, usulan yang relevan dengan tugas dan fungsi Diskominfo, atau yang bersifat umum namun dapat diintervensi oleh Diskominfo, belum teridentifikasi secara eksplisit dalam format pencatatan tersebut. Meski data formal menunjukkan "NIHIL" pada tabel usulan, Diskominfo Kabupaten Kediri tetap berkomitmen penuh untuk menjaring dan mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran lainnya. Kami memahami bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Diskominfo secara aktif akan terus:

1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, tidak hanya pada forum formal Musrenbang, tetapi juga melalui platform digital dan komunikasi langsung.
2. Mengoptimalkan fungsi aplikasi "Hallo Masbup" sebagai kanal utama untuk menampung pengaduan, aspirasi, dan masukan dari masyarakat, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah warga dalam menyampaikan suara mereka kapan saja dan di mana saja.

3. Melakukan penelaahan berkelanjutan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan representasi suara masyarakat, untuk mengidentifikasi kebutuhan terkait komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
4. Memperkuat kolaborasi dengan komunitas, akademisi, dan sektor swasta untuk mendapatkan masukan inovatif terkait pengembangan infrastruktur digital dan pelayanan publik berbasis teknologi.

Diskominfo Kabupaten Kediri meyakini bahwa setiap aspirasi masyarakat, sekecil apapun, memiliki nilai penting dalam membentuk arah pembangunan yang relevan dan berpihak kepada rakyat. Kami akan terus berupaya menciptakan mekanisme yang lebih efektif agar suara masyarakat dapat terekam dan ditindaklanjuti secara optimal dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri berupaya menciptakan **sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif** dalam perencanaan pembangunan. Hal ini juga menjadi upaya untuk menjamin bahwa program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tidak hanya memenuhi standar birokratis, tetapi juga secara moral dan etis dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Kediri.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025, kami mengadopsi pendekatan komprehensif untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang strategis dan berdampak nyata. Proses ini tidak hanya didasarkan pada analisis mendalam terhadap isu-isu krusial lokal, tetapi juga secara cermat menelaah dan mengintegrasikan kebijakan nasional yang relevan. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan setiap inisiatif yang diambil selaras dengan arah pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

Perumusan tujuan dan sasaran diawali dengan identifikasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo. Evaluasi kinerja pelayanan publik sebelumnya, yang menunjukkan adanya disparitas antara keberhasilan transformasi digital dan kualitas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di beberapa perangkat daerah, menjadi titik tolak utama. Isu-isu seperti kualitas pelayanan publik yang belum merata, belum optimalnya replikasi keberhasilan transformasi digital, kualitas dan aksesibilitas informasi publik yang belum optimal, serta tantangan dalam pemanfaatan teknologi dan standardisasi layanan digital, secara langsung dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Hal ini memastikan bahwa tujuan kami berakar kuat pada kondisi internal dan proyeksi kinerja jangka menengah.

Seiring dengan itu, penelaahan terhadap kebijakan nasional menjadi pilar penting dalam membentuk arah Renja Perubahan ini. Kami menyadari bahwa inovasi dan perkembangan di bidang komunikasi dan informatika sangat dipengaruhi oleh regulasi dan arahan dari pemerintah pusat. Beberapa kebijakan nasional yang menjadi rujukan utama antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Ini menjadi landasan utama bagi upaya peningkatan efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik melalui digitalisasi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Mendorong Diskominfo untuk terus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
3. Kebijakan Pengembangan Kota Cerdas (Smart City): Menginspirasi program-program yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan efisiensi tata kelola kota.

4. Kebijakan Keamanan Siber Nasional: Menjadi panduan dalam memperkuat sistem pertahanan siber dan melindungi data pemerintah serta masyarakat dari ancaman digital.

Diskominfo Kabupaten Kediri merumuskan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Tahun 2025 yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kediri, tetapi juga terintegrasi secara harmonis dalam kerangka pembangunan nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang kami laksanakan akan memberikan dampak yang optimal, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata pada terwujudnya Kabupaten Kediri yang semakin cerdas dan maju.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, adalah : TEMA PEMBANGUNAN :

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"

Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025 tidak hanya dirancang untuk menjawab kebutuhan lokal, tapi juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Secara khusus, Renja Diskominfo Kediri akan berkontribusi aktif dalam mendukung Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Diskominfo Kabupaten Kediri akan mengimplementasikan prioritas nasional berfokus pada penguatan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Ini adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam melayani masyarakat, sekaligus menjadi benteng pencegahan terhadap praktik korupsi.mBerikut adalah strategi Diskominfo Kabupaten Kediri dalam mendukung Prioritas Nasional 7:

1) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Kami akan terus mendorong dan memfasilitasi implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah. SPBE menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien, mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menjadi celah korupsi, dan meningkatkan transparansi proses pelayanan publik. Digitalisasi layanan akan meminimalkan diskresi dan memastikan standardisasi.

2) Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik: Dengan memastikan informasi publik mudah diakses, akurat, dan transparan melalui berbagai platform digital, kami mendukung pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Aplikasi seperti "Hallo Masbup" akan terus dioptimalkan sebagai saluran aspirasi dan pengaduan, memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memantau kinerja birokrasi dan melaporkan indikasi penyimpangan.
3) Penguatan Keamanan Sistem dan Data: Melindungi data dan sistem informasi pemerintah dari ancaman siber adalah bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Keamanan siber yang tangguh mencegah manipulasi data, kebocoran informasi, dan serangan yang dapat mengganggu pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat disalahgunakan untuk kepentingan koruptif.
4) Edukasi dan Sosialisasi Anti-Korupsi Berbasis Digital: Diskominfo akan memanfaatkan media komunikasi publik untuk menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi, pentingnya integritas, serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Kampanye digital yang inovatif akan dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan ASN mengenai pencegahan korupsi.

Dengan mengintegrasikan Prioritas Nasional 7 ke dalam Renja 2025, Diskominfo Kabupaten Kediri tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan transformasi digital, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari praktik korupsi. Ini adalah langkah konkret menuju birokrasi yang lebih modern, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan langkah strategis yang berakar kuat pada fondasi perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renja perubahan ini secara fundamental didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo yang telah teridentifikasi dan ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang efektif harus menjadi turunan logis dan operasional dari Renstra. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk tahun 2025 merupakan upaya konkret untuk menjawab dan

mengatasi isu-isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik		Indeks SPBE	Indeks	4,76
	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Indeks	95,94

Tabel 3.1

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri telah merumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis untuk Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, yang berfokus pada penguatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rumusan ini adalah hasil analisis mendalam terhadap isu-isu penting yang dihadapi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo 2021-2026, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Berikut adalah tujuan dan sasaran yang akan menjadi panduan Diskominfo Kabupaten Kediri di tahun 2025:

Tujuan utama Diskominfo di tahun 2025 adalah mencapai transformasi digital yang menyeluruh dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini berarti mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan ini secara langsung menanggapi permasalahan disparitas kualitas layanan dan belum optimalnya replikasi keberhasilan digital di seluruh perangkat daerah.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini, Diskominfo menetapkan **alat ukur dan target** dengan indikator yang jelas:

- **Alat ukur:** Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- **Satuan Indikator:** Indeks
- **Target Tahun 2025: 4,76**

Peningkatan Indeks SPBE menjadi target ambisius yang menunjukkan komitmen Diskominfo untuk terus mendorong integrasi sistem, peningkatan infrastruktur TIK, dan peningkatan kompetensi SDM dalam kerangka *e-government*.

Sasaran strategis Diskominfo adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Ini mencakup upaya untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, relevan, dan *up-to-date* dengan mudah. Sasaran strategis ini merupakan respons terhadap isu kualitas dan aksesibilitas informasi publik yang belum optimal, serta memperkuat peran Diskominfo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pencapaian Sasaran strategis ini akan diukur melalui:

- **Alat Ukur :** Indeks Kategori PPID
- **Satuan Indikator:** Indeks
- **Target Tahun 2025: 95,94**

Target tinggi pada Indeks Kategori PPID menunjukkan tekad Diskominfo untuk mencapai standar tertinggi dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik, mencakup aspek ketersediaan, kecepatan respons, hingga kemudahan akses bagi masyarakat.

Dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur ini, Diskominfo Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja di bidang komunikasi dan informatika. Ini adalah langkah konkret menuju terwujudnya pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri di tahun 2025.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri telah merumuskan secara cermat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Rumusan ini disusun untuk secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu "Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik" dengan target Indeks SPBE 4,76, dan "Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik" dengan target Indeks Kategori PPID 95,94.

Berikut adalah gambaran umum rencana program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2025:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas internal Diskominfo untuk menjamin operasional yang efisien dan efektif.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
    1) Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    2) Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

       (Tujuan: Memastikan perencanaan yang matang dan evaluasi yang terukur untuk seluruh program Diskominfo)
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
    1) Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    2) Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
    3) Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
    4) Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
    5) Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
    6) Kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
    7) (Tujuan: Menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien sesuai standar akuntansi pemerintahan)
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
    1) Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
    2) Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

       (Tujuan: Memastikan pengelolaan aset daerah yang tertib dan bertanggung jawab)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
    1) Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
    2) Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    3) Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
    4) Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
    5) Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
    6) Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

7) Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

(Tujuan: Mendukung operasional harian kantor yang lancar dan memadai)

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   1) Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   2) Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   3) Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

   (Tujuan: Memenuhi kebutuhan dasar operasional dan utilitas kantor)
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   1) Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   2) Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

   (Tujuan: Memastikan aset kendaraan dan peralatan operasional terpelihara dengan baik untuk mendukung kinerja)

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas informasi pemerintah kepada masyarakat, serta menjalin komunikasi yang efektif.

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
   1) Kegiatan: Relasi Media.
   2) Kegiatan: Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.
   3) Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik.
   4) Kegiatan: Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik.
   5) Kegiatan: Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
   6) Kegiatan: Penyusunan Konten.

   (Tujuan: Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik melalui penyebaran informasi yang akurat dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta meningkatkan Indeks Kategori PPID).

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini berpusat pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta aplikasi digital untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
    1) Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda.
    2) Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.

       (Tujuan: Meningkatkan Indeks SPBE melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan mendorong inisiatif menuju Kabupaten Kediri Cerdas)

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota:
    1) Kegiatan: Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional.
    2) Kegiatan: Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.

       (Tujuan: Memastikan data statistik tersedia, berkualitas, dan dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan)

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini berfokus pada penguatan keamanan informasi dan sistem digital pemerintah dari berbagai ancaman.

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
    1) Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

       (Tujuan: Melindungi data dan sistem informasi pemerintah dari ancaman siber, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi).

Setiap program dan kegiatan di bawah ini dirancang sebagai langkah konkret dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kediri yang lebih cerdas, transparan, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Melalui implementasi program dan kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Kediri optimis dapat mencapai target Indeks SPBE 4,76 dan Indeks Kategori PPID 95,94 di tahun 2025, sekaligus mewujudkan transformasi digital yang nyata demi pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri telah menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan secara detail untuk tahun 2025, lengkap dengan Prakiraan Maju Tahun 2026. Rumusan ini menjadi panduan operasional kami dalam mencapai tujuan strategis Diskominfo, yaitu transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Setiap elemen dalam rencana ini dirancang untuk mendukung visi Kabupaten Kediri yang lebih cerdas dan responsif melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi.

Berikut adalah uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan Diskominfo Kabupaten Kediri untuk Tahun 2025 dan proyeksi untuk Tahun 2026:

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Perkiraan Rencana Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Dinas Komunikasi dan Informatika				17.981.857.389,00			25.645.343.014,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.981.857.389,00			25.645.343.014,00
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.944.315.389,00			24.560.009.014,00
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	7.371.521.089,00		100	10.856.934.014,00
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	3.112.100,00		4	5.707.227,00

	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.894.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	3	4.489.816,00
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.217.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	1.217.411,00
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	dokumen	20	5.605.720.157,00		20	9.345.245.275,00
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	44	4.506.165.257,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	44	7.798.050.777,00
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	35	924.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	35	1.486.538.800,00

	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	171.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	6	56.760.000,00
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.762.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	1.762.485,00
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	1.555.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	14	1.555.848,00
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Dokumen	2	577.200,00	Dana Alokasi Umum	2	577.365,00

							Anggaran				(DAU)		
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	dokumen	2	134.750.600,00		2	134.750.625,00
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	121.550.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	121.550.625,00
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	13.200.000,00
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	dokumen	30	579.516.500,00		30	325.267.756,00
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.054.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	7.056.925,00
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	63.913.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	50.674.212,00
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10.735.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	20.325.919,00
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	23.491.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	39.291.240,00
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	42.458.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	42.569.460,00
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	25.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	26.000.000,00
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	406.304.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	20	139.350.000,00

	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	901.121.732,00		12	845.622.176,00
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0,00	-	1	0,00
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	479.121.732,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	479.122.176,00
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	422.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	366.500.000,00
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik	unit	30	147.300.000,00		30	200.340.955,00
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	14	73.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	14	113.553.809,00

							Pajaknya						
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	73.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	16	86.787.146,00
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	4.520.994.300,00		100	7.803.075.000,00
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang terkelola	konten	900	4.520.994.300,00		900	7.803.075.000,00
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media							
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	12	2.852.998.000,00	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	12	4.542.542.000,00

	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat							
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	3	202.374.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	3	200.000.000,00
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik							
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	5	251.905.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	5	250.000.000,00
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12	144.944.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	95.533.000,00
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	36	896.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	36	2.500.000.000,00
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten							

							Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	500	172.071.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	500	215.000.000,00
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah	%	100	5.051.800.000,00		100	5.900.000.000,00
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola	sistemnformasi	170	5.051.800.000,00		170	5.900.000.000,00
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda							
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	4.851.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	5.700.000.000,00
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas							
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	unit	40	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	40	200.000.000,00
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				262.542.000,00			262.542.000,00
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah	ada	ada	262.542.000,00		ada	262.542.000,00

	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah	Paket	1	262.542.000,00		1	262.542.000,00
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional							
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	149.969.000,00	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	100	149.969.000,00
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar							
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	25	112.573.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	25	112.573.000,00
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				775.000.000,00			822.792.000,00
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan keamanan persandian dan TI	%	100	775.000.000,00		100	822.792.000,00

	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	Paket	1	775.000.000,00		1	822.792.000,00
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	6	775.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	6	822.792.000,00
	J U M L A H									**17.981.857.389,00**			**25.645.343.014,00**

Tabel 3.2

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan komprehensif. Dokumen ini secara detail memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun, lengkap dengan pagu indikatif anggaran yang dialokasikan. Seluruh rancangan ini memiliki tujuan tunggal: mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Kediri. Penyusunan Renja dan pendanaan ini adalah cerminan komitmen Diskominfo untuk secara aktif berkontribusi pada prioritas pembangunan daerah. Kami memahami peran krusial komunikasi dan informatika dalam memajukan Kabupaten Kediri di berbagai sektor. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang termuat di dalamnya telah diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang pemerintah daerah.

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025 secara spesifik dirancang untuk mendukung prioritas perangkat daerah kami sendiri. Isu-isu penting seperti peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik digital, optimalisasi transformasi digital, dan penguatan tata kelola informasi yang adaptif, menjadi fokus utama yang diintervensi melalui program-program yang terukur. Ini termasuk upaya peningkatan Indeks SPBE dan Indeks Kategori PPID, yang merupakan indikator kunci keberhasilan kami. Tidak hanya itu, Renja dan pendanaan 2025 juga mencakup alokasi yang memadai untuk pemenuhan pelayanan internal perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Aspek-aspek seperti administrasi umum, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, hingga pemeliharaan aset, semuanya diperhitungkan untuk memastikan operasional Diskominfo berjalan lancar dan mendukung kinerja yang prima. Renja dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah instrumen perencanaan yang holistik. Ini bukan sekadar daftar kegiatan dan angka, melainkan sebuah peta jalan yang jelas untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi demi pelayanan publik yang lebih baik, mendukung prioritas pembangunan daerah, dan mewujudkan Kabupaten Kediri yang semakin maju dan responsif di era digital. Prioritas kegiatan Diskominfo di tahun 2025 berakar pada optimalisasi transformasi digital dan tata kelola informasi yang adaptif, yang merupakan kunci untuk mengatasi isu-isu penting seperti kesenjangan kualitas pelayanan digital, belum optimalnya replikasi keberhasilan transformasi, serta tantangan aksesibilitas informasi dan keamanan siber. Berikut adalah Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025:

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana
						Dinas Komunikasi dan Informatika		18.850.604.563,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		18.850.604.563,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		17.821.553.963,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	8.608.145.163,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.754.100,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	640.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	7.083.896.300,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.786.005.061,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	924.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171.522.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	690.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	690.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	690.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	130.464.400,00	
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	115.471.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	103.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	904.080.900,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.708.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33.375.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	305.630.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.711.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21.515.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.179.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	902.225.532,00	

	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	-
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	429.121.002,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	423.051.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara baik	139.550.000,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	4.090.808.800,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang terkelola	4.520.994.300,00	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media			
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di	2.700.044.000,00	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)

							Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	79.088.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik			
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	182.157.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	81.294.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	855.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten			
							Jumlah Konten Informasi Publik	193.124.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah	5.122.600.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola	5.051.800.000,00	
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			

							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4.945.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	176.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		405.656.600,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah	405.656.600,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah	262.542.000,00	
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	320.428.400,00	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	85.228.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		623.394.000,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan keamanan persandian dan TI	623.394.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	775.000.000,00	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	623.394.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	J U M L A H							**18.850.604.563,00**	

Tabel 4.1

Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memainkan peran sentral. Untuk tahun 2025, Diskominfo Kabupaten Kediri telah mengalokasikan anggaran perubahan sebesar Rp 18.850.604.563,00. Anggaran ini sepenuhnya ditujukan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, mencakup tiga bidang utama: Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian.

Fokus Utama Anggaran Diskominfo 2025

1. Bidang Komunikasi dan Informatika: Pilar Utama Pelayanan dan Keterbukaan Informasi

   Bidang ini menjadi fokus terbesar dengan alokasi Rp 17.821.553.963,00. Anggaran ini terbagi dalam tiga program kunci yang saling mendukung:

   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

      Program ini menerima alokasi terbesar, Rp 8.608.145.163,00, guna memastikan roda pemerintahan berjalan lancar. Ini mencakup:

      1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Sejumlah Rp 2.754.100,00 dialokasikan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, memastikan akuntabilitas dan efektivitas program.
      2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Bagian terbesar dari program ini, yaitu Rp 7.083.896.300,00, dikhususkan untuk gaji dan tunjangan ASN (Rp 5.786.005.061,00), administrasi pelaksanaan tugas, verifikasi keuangan, serta penyusunan berbagai laporan keuangan bulanan hingga akhir tahun.
      3. Administrasi Barang Milik Daerah: Rp 130.464.400,00 dialokasikan untuk pengamanan dan penatausahaan aset daerah, memastikan pengelolaan yang tertib.
      4. Administrasi Umum Perangkat Daerah: Rp 904.080.900,00 mencakup operasional harian kantor, seperti listrik, perlengkapan, logistik, bahan cetakan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi.
      5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Dana sebesar Rp 902.225.532,00 tersedia untuk layanan penting seperti komunikasi, air, dan listrik. Menariknya, tidak ada alokasi untuk jasa surat menyurat dalam periode ini.
      6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Rp 139.550.000,00 dialokasikan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan lainnya, menjaga aset tetap prima.

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Dengan anggaran Rp 4.090.808.800,00, program ini berfokus pada peningkatan keterbukaan dan penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan utamanya meliputi:

1. Relasi Media: Sebesar Rp 2.700.044.000,00 didedikasikan untuk menjalin kemitraan erat dengan media terverifikasi dan aktif.
2. Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat: Rp 79.088.000,00 dialokasikan untuk mendukung komunitas yang aktif menyebarkan informasi.
3. Pelayanan Informasi Publik: Rp 182.157.900,00 untuk memastikan setiap permohonan informasi publik diselesaikan sesuai regulasi.
4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik: Rp 81.294.900,00 untuk memantau isu publik dan merumuskan strategi komunikasi.
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Penyusunan Konten: Masing-masing Rp 855.100.000,00 dan Rp 193.124.000,00 dialokasikan untuk mengelola media milik pemerintah dan memproduksi konten informasi yang relevan dan mudah diakses.

3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini mengalokasikan Rp 5.122.600.000,00 untuk memperkuat infrastruktur digital pemerintah, termasuk:

1. Pengelolaan E-government: Mayoritas anggaran program, yaitu Rp 5.051.800.000,00, dikhususkan untuk pengelolaan sistem informasi pemerintah, terutama fasilitasi penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang mencapai Rp 4.945.800.000,00.
2. Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten/Kota Cerdas: Rp 176.800.000,00 untuk mendorong dan menyosialisasikan program kota cerdas di lingkungan perangkat daerah.

2. Bidang Statistik: Data Akurat untuk Perencanaan Pembangunan

Bidang Statistik menerima alokasi Rp 405.656.600,00 dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat. Anggaran ini mencakup:

1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral: Rp 262.542.000,00 untuk pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data statistik.

1. Peningkatan Peran Statistik Sektoral: Rp 320.428.400,00 untuk mendorong perangkat daerah lebih banyak menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

2. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar: Rp 85.228.200,00 untuk memastikan kualitas dan standar dalam setiap proses statistic.

3. Bidang Persandian: Menjaga Keamanan Informasi Pemerintah

Untuk melindungi informasi vital pemerintah, Bidang Persandian dialokasikan Rp 623.394.000,00 melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Fokus utamanya adalah:

1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi: Program ini bertujuan memastikan keamanan informasi sandi dan sistem informasi. Meskipun total anggaran program adalah Rp 623.394.000,00, ada angka Rp 775.000.000,00 yang tertera untuk kegiatan ini, yang kemungkinan merupakan penyesuaian atau target yang lebih tinggi dari total program.

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik: Anggaran Rp 623.394.000,00 secara spesifik dialokasikan untuk implementasi keamanan informasi, baik dalam bentuk digital maupun non-digital.

Dengan alokasi anggaran ini, Diskominfo Kabupaten Kediri siap untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan aman melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tahun 2025.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini merupakan wujud nyata komitmen dalam mengakselerasi transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh program dan kegiatan yang termuat di dalamnya telah dirumuskan secara cermat, dengan fokus utama pada pencapaian tujuan strategis yaitu "Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik" dengan target Indeks SPBE 4,76, serta "Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik" dengan target Indeks Kategori PPID 95,94.

Alokasi anggaran Diskominfo Tahun 2025 secara strategis didistribusikan untuk mendukung pilar-pilar utama ini:

1. Bidang Komunikasi dan Informatika menjadi fokus terbesar dengan alokasi total Rp 17.821.553.963,00. Anggaran ini memastikan kelancaran roda pemerintahan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rp 8.608.145.163,00), yang mencakup perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan (termasuk gaji dan tunjangan ASN), pengelolaan barang milik daerah, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, dan pemeliharaan aset. Selanjutnya, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Rp 4.090.808.800,00) didedikasikan untuk menjalin relasi media, kemitraan dengan komunitas informasi masyarakat, pelayanan informasi publik, monitoring opini publik, serta pengelolaan media dan penyusunan konten yang relevan. Terakhir, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Rp 5.122.600.000,00) berinvestasi pada penguatan infrastruktur digital pemerintah, khususnya fasilitasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan koordinasi inisiatif Kabupaten/Kota Cerdas.
2. Bidang Statistik menerima alokasi Rp 405.656.600,00 melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Dana ini krusial untuk memastikan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, dengan kegiatan peningkatan peran statistik sektoral dan pelaksanaan proses bisnis statistik sesuai standar. Data yang berkualitas adalah fondasi bagi perencanaan pembangunan yang efektif.
3. Bidang Persandian dialokasikan Rp 623.394.000,00 melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Anggaran ini difokuskan pada implementasi keamanan informasi pemerintah, baik berbasis elektronik maupun non-elektronik, untuk melindungi data dan sistem vital dari berbagai ancaman siber, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Setiap program dan kegiatan yang diuraikan dalam Renja Perubahan ini dirancang sebagai langkah konkret dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kediri yang lebih cerdas, transparan, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang

optimal. Dengan implementasi yang disiplin dan akuntabel, Diskominfo Kabupaten Kediri optimis dapat mencapai target Indeks SPBE 4,76 dan Indeks Kategori PPID 95,94 di tahun 2025, sekaligus mewujudkan transformasi digital yang nyata demi pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih akuntabel. Komitmen ini akan senantiasa menjadi landasan dalam setiap langkah yang diambil, demi terwujudnya Visi pembangunan daerah yang lebih baik dan berdaya saing.

Renja Perubahan ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah manifestasi dari harapan besar Diskominfo Kabupaten Kediri untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang prima. Komitmen kuat seluruh jajaran Diskominfo adalah untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi. Kaidah-kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman utama, memastikan setiap langkah selaras dengan regulasi yang berlaku dan berorientasi pada hasil yang terukur. Ke depan, Diskominfo Kabupaten Kediri akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta menyusun rencana tindak lanjut yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, kami yakin dapat mewujudkan Kabupaten Kediri yang lebih maju, informatif, dan aman dalam era digital.

Kediri, 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

NUR MIFTAHUL FUAD

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA